

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era reformasi yang sedang terjadi di negeri ini telah memberi perubahan pada tatanan pemerintah, salah satunya pada tatanan pemerintah daerah untuk menuju tatanan pengelolaan pemerintah yang lebih baik. Ulasan yang telah dibuat sektor publik harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat bukan hanya memenuhi kewajiban tetapi harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Bentuk nyata dari reformasi ini yaitu terdapatnya penataan peraturan-peraturan pemerintah serta penataan sistem pengelolaan keuangan daerah (Herlina et. al., 2021).

Berjalannya waktu dengan penerapan desentralisasi daerah, sepenuhnya berpengaruh pada pengelolaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih maka dilakukan upaya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu laporan keuangan dari pemerintahan daerah harus dikerjakan dengan konsisten, transparan, tepat waktu dan bertanggungjawab. Pertanggungjawaban ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi suatu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah selama satu periode anggaran. Hal ini

semakin menguat pada pertumbuhan pemerintah Indonesia yaitu terdapatnya desakan terkait penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas akan mencerminkan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah terlaksana dengan baik .

Faktor-faktor yang relevan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor pertama transparansi. Falsafah dan konstitusi negara, tujuan dan sasaran pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas, tingkat keterbukaan (transparansi) pengelolaan, sistem manajemen birokrasi, misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait, dan jangkauan pengendalian dan kompleksitas program instansi (Halim & Iqbal, 2019).

Akuntabilitas (*accountability*) dimaksud adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan penanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2017).

Penelitian oleh Herlina et. al. (2021) hanya bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Peneliti menambahkan dua

variabel yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan.

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Beberapa pokok temuan yang perlu untuk diperhatikan antara lain: 1) masih adanya penganggaran serta pengakuan belanja yang belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan; 2) masih belum optimal pengendalian atas pengelolaan pendapatan; 3) masih adanya kekurangan penyelesaian terhadap beberapa paket pekerjaan (<http://ppid.jepara.go.id>, 2021).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diantaranya faktor transparansi, faktor kompetensi, faktor sistem akuntansi keuangan, faktor penyajian laporan keuangan daerah, dan faktor aksesibilitas laporan keuangan, serta penerapan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Faktor pertama, transparansi ialah pertanggung jawaban dan keterbukaan saat membuat strategi pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dengan tahun anggaran tertentu. Hasil penelitian Herlina et. al. (2021) dan Aprilya & Fitria (2020) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun

hasil penelitian Sukmawati & Nurfitriani (2019) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor kedua, kompetensi ialah keahlian seseorang berupa pemahaman, ketrampilan dan karakteristik yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020). Apabila ASN memiliki kompetensi yang baik, maka diduga tindakan korupsi yang merugikan daerah dan negara tidak akan dilakukan oleh ASN yang bekerja pada instansi tersebut. Hasil penelitian Herlina et. al. (2021) dan Puspa & Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian Jamil et. al. (2020) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor ketiga, sistem akuntansi keuangan ialah suatu prosedur dari mengumpulkan data, mencatat, penggolongan, dan pengikhtisaran sehingga menjadi suatu laporan keuangan. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana.

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Hasil penelitian Herlina et. al. (2021) dan Yulianti et. al. (2019) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian Mulyanto et. al. (2020) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor keempat, penyajian laporan keuangan ialah suatu penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan daerah dengan memenuhi peraturan yang tepat waktu dan disusun atas dasar standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara massal. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipahami oleh pengguna. Pemerintah juga wajib meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi laporan keuangan agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, dimana pemerintah bertindak sebagai organisasi yang mampu mengelola dana masyarakat. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas dapat dilihat dari kurang relevannya semua informasi yang tertuang dalam laporan tahunan sehingga para pengguna tidak dapat secara langsung mengetahui semua informasi laporan keuangan

tersebut. Adanya informasi yang kurang lengkap menyebabkan masyarakat menuntut adanya aksesibilitas untuk memudahkan para pengguna mendapatkan informasi laporan keuangan. Hasil penelitian Anggraini & Hermanto (2021) dan Mansyuer & Efendi (2020) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian Mulyanto et. al. (2020) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor kelima, aksesibilitas laporan keuangan daerah ialah aksesibilitas itu sendiri sangat melekat pada pentingnya masyarakat dalam memperoleh kemudahan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan karena penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Mulyanto, 2020). Hasil penelitian Mansyuer & Efendi (2020) dan Hasibuan & Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian Anggraini & Hermanto (2021), Mulyanto et. al. (2020) serta Puspa & Prasteyo (2020) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor keenam ini sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, seperti proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Herlina et.al., 2021). Hasil penelitian Mansyuer & Efendi (2020) dan Puspa & Prasteyo (2020) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian Angraini & Hermanto (2021) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini mereplikasi atas penelitian yang dilakukan oleh Herlina et.al. (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Variabel Moderasi”. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian Herlina et.al. (2021) yaitu pertama, penambahan variabel independen yaitu variabel penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Penambahan variabel penyajian laporan keuangan dikarenakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penambahan penyajian laporan keuangan dikarenakan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan penyajian laporan keuangan yang berperan penting sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimana

didalamnya terdapat transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang dilakukan selama periode pelaporan. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah harus menerapkan standar akuntansi yang berlaku umum untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipahami oleh pengguna.

Penambahan variabel aksesibilitas laporan keuangan dikarenakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan ditambahkan sebagai variabel independen karena Aksesibilitas memberikan fasilitas kepada publik agar dapat menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan melalui kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai sendiri mana laporan keuangan yang benar dan mana laporan keuangan yang salah. Perbedaan kedua adalah objek penelitian. Penelitian Herlina et.al. (2021) dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan latar belakang atau fenomena tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Akuntansi Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara).**

## 1.2 Ruang Lingkup



Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variabel transparansi ( $X_1$ ), kompetensi ( $X_2$ ), sistem akuntansi keuangan ( $X_3$ ), penyajian laporan keuangan daerah ( $X_4$ ), aksesibilitas laporan keuangan ( $X_5$ ) sebagai variabel independen, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ( $Y$ ) sebagai variabel dependen, dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah ( $Z$ ) sebagai variabel moderasi.
2. Objek dari penelitian ini difokuskan pada OPD Kabupaten Jepara.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang sudah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
4. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
5. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?

6. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
7. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
8. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
9. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?
10. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
2. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.

3. Menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
4. Menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
5. Menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
6. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
7. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
8. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
9. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.

10. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memperkuat aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh transparansi, kompetensi, sistem akuntansi keuangan, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderasi.

### **2. Bagi OPD Kabupaten Jepara**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberi masukan kepada pihak manajemen atas hasil penelitian yang dilakukan guna untuk kemajuan OPD Kabupaten Jepara.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.